

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian serta ruang lingkup penelitian tentang efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh Di Kota Semarang.

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang padat dan tidak teratur serta tidak memiliki sarana prasarana yang memenuhi syarat yang layak untuk tempat tinggal baik fisik, kesehatan maupun sosial. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Pemenuhan akan kebutuhan tersebut baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan kumuh di kawasan permukiman.

Lingkungan permukiman kumuh merupakan permasalahan permukiman yang sangat kompleks karena pada lingkungan permukiman kumuh ini tidak hanya kondisi fisik lingkungan yang buruk akan tetapi juga menyangkut permasalahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggal pada permukiman tersebut. Menurut World Bank (1999) lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas

pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Adapun pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini.

Oleh karena itu salah satu upaya pemerintah untuk pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Sampai saat ini berbagai upaya pemerintah untuk menangani permasalahan lingkungan permukiman kumuh telah dilakukan, tetapi permukiman kumuh tersebut masih tumbuh, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Berdasarkan data luas kumuh, pada tahun 2004 luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 54.000 hektar. Sementara tahun 2009, luas pemukiman kumuh menjadi 57.800 hektar. Dalam rentang lima tahun, kawasan kumuh bertambah menjadi 3.800 hektar. Kemudian, melalui Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015, pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luas permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Kondisi tersebut telah menjadi agenda penting pemerintah sesuai amanat UU No 17 Tahun 2017 yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh tahun 2020. Undang-Undang No 1 tahun 2011 bahwa memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan hak warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak.

Sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu tercapainya pengurangan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap infrastruktur tersebut di tinjau pada kriteria kekumuhan yang menjadi dasar perhitungan pengurangan luas kumuh sesuai Peraturan Menteri PUPR No 2 tahun 2016 yang terdiri dari: a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; f. pengelolaan persampahan; dan g. proteksi kebakaran.

Terdapat 4 tahap dalam implemetasi program KOTAKU yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi (Dewi Yulianti, 2017). Program KOTAKU dilaksanakan secara nasional di 271 Kota/Kabupaten di 34 Provinsi, salah satunya adalah Kota Semarang. Implementasi Program KOTAKU di Kota Semarang yang sudah dilakukan pada Tahun 2017 dilaksanakan di 38 Kelurahan yang mendapat bantuan perbaikan infrastruktur dengan total bantuan dana sebesar Rp. 17.200.000.000 yang tersebar di 38 kelurahan tersebut. Serta di tahun 2018 dilaksanakan di 26 kelurahan dari

total 62 kelurahan yang ada di Kota Semarang dengan total bantuan dana sebesar Rp. 17.600.000.000 yang bersumber dari dana APBN.

Berdasarkan data realisasi kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-202, data luas permukiman kumuh yang ada di Kota Semarang dirinci mulai tahun 2011 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas Permukiman kumuh Kota Semarang

Tahun	Luas
2011	236,01 Ha
2012	224,77 Ha,
2013	209,33 Ha
2014	415,83
2016	295,95 Ha

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang, Luas Permukiman kumuh Kota Semarang adalah 415,83 ha atau 4,16 km² atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang.

Jadi, dengan adanya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya tersebut diharapkan dapat mengurangi luas permukiman kumuh yang ada di Kota Semarang. Dalam pencapaian pengurangan luas permukiman kumuh, di Kota Semarang telah menetapkan target pengurangan kumuh menjadi 0% di tahun 2020 seperti yang tertuang didalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Tabel 1.2. Target Capaian Luas Permukiman kumuh Kota Semarang

Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	0,70	0,50	0,30	0	0
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	262,23	187,31	112,39	0	0

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

Berdasarkan target capaian luas permukiman kumuh di Kota Semarang tersebut, melalui pelaksanaan program KOTAKU diharapkan terjadi pengurangan luas permukiman kumuh di Kota Semarang berdasarkan target capaian yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Program KOTAKU dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang mulai tahun 2016 hingga saat ini, akan tetapi efektivitas program terhadap pengurangan luas permukiman kumuh belum diketahui. Penelitian terkait dengan topik program kotaku maupun efektivitas program telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, tetapi peneliti belum menemukana penelitian tentang topik efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Semarang. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian terkait efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Semarang.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk tercapainya pengurangan luas permukiman kumuh menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2016 menginisiasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kota/Kabupaten di 34 Provinsi, salah satunya adalah Kota Semarang. Pelaksanaan program KOTAKU di Kota Semarang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Implementasi pelaksanaan Program KOTAKU Tahun 2017 dilaksanakan di 38 Kelurahan dengan total bantuan perbaikan infrastruktur sebesar Rp. 17.200.000.000 yang bersumber dari dana APBN. Dan di tahun 2018 dilaksanakan di 26 kelurahan dari total 62 kelurahan yang ada di Kota Semarang dengan total bantuan dana sebesar Rp. 17.600.000.000 yang bersumber dari dana APBN.

Berdasarkan data implementasi pelaksanaan program KOTAKU di Kota Semarang tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi tentang efektivitas program terhadap pengurangan luas permukiman kumuh di Kota Semarang. Evaluasi memungkinkan pemerintah untuk meninjau kembali sudah sejauhmana program dan kegiatan memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perumusan masalah yang dapat dijabarkan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Semarang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Semarang
2. Menganalisis Faktor pendukung dan penghambat efektivitas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan belajar dan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan strategi program penanganan permukiman kumuh selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan topik program KOTAKU maupun efektivitas program telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, tetapi peneliti belum menemukana penelitian tentang topik efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Penelitian yang sudah ada tentang program KOTAKU di antaranya Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung oleh Dewi

Zulyanti tahun 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Keberhasilan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Kasus di Kelurahan Kebondalem Kota Cilegon dan Kelurahan Lontar Baru Kota Serang Provinsi Banten) oleh Amalia Itani Warganegara tahun 2017.

Sedangkan penelitian tentang topik efektivitas maupun evaluasi di antaranya Efektivitas Kinerja Program Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Studi Kasus: Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta) Yanuar Kusuma Wardani tahun 2017, Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kota Bima Arif Budiman tahun 2016, Evaluasi program PNPM mandiri dalam Peningkatan prasarana kehidupan di Kelurahan taroada Kabupaten maros Haryanto tahun 2013.

Pada penelitian ini peneliti mengambil tema efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luas permukiman kumuh di Kota Semarang, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bahasan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas program KOTAKU serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luas permukiman kumuh di Kota Semarang. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Yanuar Kusuma Wardani, 2017	Efektivitas Kinerja Program Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Studi kasus: Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)	Pendekatan deduktif dan metode analisis kuantitatif dengan alat analisis statistik deskriptif	Secara keseluruhan tingkat efektivitas kinerja Program PLPBK Kelurahan Karangwaru sudah efektif. Semua kinerja mencakup kinerja output, kinerja <i>outcome</i> , maupun kinerja impact sudah efektif. Kinerja yang telah efektif menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran dari Program PLPBK di Kelurahan Karangwaru sudah tercapai.

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
2.	Dewi Zulyanti, 2017	Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung	Menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif	Ada 4 tahap utama pelaksanaan yaitu, <ul style="list-style-type: none"> - tahap persiapan, dalam tahap ini terdiri dari: sosialisasi sekaligus pembentukan LKM melalui pemilihan dari masyarakat setempat dan musyawarah kelurahan I yang membahas hasil dari sosialisasi, - tahap perencanaan, dalam tahap ini terdiri dari: musyawarah kelurahan II yang diikuti oleh kaum perempuan dan musyawarah kelurahan III dengan penetapan jadwal RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dan penyusunan anggaran dana yang akan dikeluarkan, - tahap pelaksanaan, dalam tahap ini terdiri dari musyawarah kelurahan IV yang membahas tentang langkah-langkah pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan barang, kemudian pelaksanaan pembangunan infrastruktur. dan - tahap evaluasi, di dalamnya terdapat musyawarah kelurahan V yang membahas laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pembentukan KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan)
3.	Amalia Itani Warganegara, 2017	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Keberhasilan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi	Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi antara lain adalah pengaruh struktur, kultur dan proses sosial yang secara nyata tampak pada tangga partisipasi. Sehingga pendalaman terhadap modal sosial sebagai langkah

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Kasus di Kelurahan Kebondalem Kota Cilegon dan Kelurahan Lontar Baru Kota Serang Provinsi Banten)		awal ketika pemerintah akan menjalankan suatu program disuatu wilayah karena jika dalam kondisi modal sosialnya terlalu rendah maka program itu tidak bisa hanya berpikir <i>output</i> saja (perubahan fisik) tetapi juga memodifikasi modal sosialnya agar sasaran program dapat tercapai.
4.	Dody Noris, Sugianto, Irin Caisarina, 2017	Kajian Perubahan Tingkat Kekumuhan Pasca Penanganan Kawasan Kumuh Cot Bak U, Kota Sabang Provinsi Aceh	Metode kuantitatif dan komparatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh terhadap 2 (dua) kriteria kekumuhan yang telah dilaksanakan dikedua kawasan kumuh tersebut yaitu jalan lingkungan dan drainase lingkungan tidak memberikan perubahan yang besar terhadap nilai kekumuhan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Surat Keputusan Walikota Sabang di tahun 2016. • Perubahan nilai kekumuhan untuk kawasan Cot Bak U sebelum penanganan sebesar 31 dan berkurang menjadi 29 setelah penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, sehingga memiliki selisih sebesar 2 point.
5.	Arif Budiman, 2016	Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kota Bima	Deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi masyarakat pada kelurahan Nungga masuk kategori sedang, pada Kelurahan Rite dan Kelurahan Lelamase masuk kategori rendah. • Air limbah domestik yang diolah di unit IPAL komunal dan MSK++ kecuali parameter TSS tersebut bermanfaat bagi lingkungan karena <i>effluent</i> aman dibuang ke lingkungan dan memberikan kontribusi penurunan beban pencemaran

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>pada lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program SLBM memiliki manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi dari segi kesehatan tidak ada perbedaan <i>signifikan</i> antara sebelum dan sesudah pelaksanaan Program SLBM.
6.	Ceverene Wanjiru Mureithi, 2016	<i>The Evolution of Slum Upgrading: Mainstream Approaches Used</i>	kualitatif	<p>Komunitas internasional merekomendasikan peningkatan <i>in situ</i> sebagai praktik terbaik untuk peningkatan kumuh. Ini didukung oleh bukti empiris dari berbagai proyek. Namun, tampaknya pendekatan khusus yang dipilih untuk menangani permukiman kumuh sebagian besar tergantung pada negara. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ; mis., ketersediaan lahan, undang-undang setempat, donor dll. Semua ini dan banyak faktor lainnya akan menentukan pendekatan mana yang paling cocok untuk proyek tertentu.</p>
7.	Haryanto, 2013	Evaluasi program PNPM mandiri dalam Peningkatan prasarana kehidupan di Kelurahan Taroadi Kabupaten Maros	Menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan dalam artian peningkatan prasarana kehidupan di Kelurahan Taroadi yang secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat , • Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, • Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengangkutan hasil produksi pertanian melalui salah satu program kerja PNPM Mandiri yakni perbaikan infrastruktur jalan tani (fisik). • memperbaiki kesejahteraan masyarakat (kesehatan masyarakat) melalui program kerja PNPM Mandiri yakni

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu
8.	Laura Jaitman and José Brakarz, 2013	<i>Evaluation of Slum Upgrading Programs</i>	Evaluasi kuantitatif dan kualitatif, dengan metode komparatif	<p>Ada dua kesimpulan yang utama dalam penelitian evaluasi peningkatan permukiman kumuh yaitu menyangkut masalah metodologis terkait dengan evaluasi program peningkatan permukiman kumuh dan meneliti efek dari berbagai program pada hasil yang diinginkan. Yang di rinci sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memilih metodologi evaluasi - Mengevaluasi program keseluruhan - Mengevaluasi komponen individu - Mengevaluasi efek <i>marginal</i> dari beberapa komponen individu - Efektivitas peningkatan permukiman kumuh
9.	Ni Wayan Budiani, 2009	Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna" Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dilihat dari variabel ketepatan sasaran program dan variabel tujuan program penanggulangan pengangguran dapat dikatakan cukup efektif. Untuk variabel tingkat sosialisasi program diperoleh hasil sangat efektif. Sedangkan jika dilihat dari variabel pemantauan pelaksanaan program oleh dinas terkait diperoleh hasil tidak efektif. • Untuk tingkat pendapatan peserta program setelah mengikuti program penanggulangan pengangguran yang dilaksanakan oleh Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" di Desa Sumerta Kelod diperoleh hasil positif.

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
10.	Samsook Boonyabancha, 2009	<i>Land for housing the poor – by the poor : experiences from the Baan Mankong nationwide slum upgrading programme in Thailand</i>	Metode analisis deskriptif kuantitatif	<p>Lahan untuk perumahan orang/kaum miskin dapat diperoleh dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapat dukungan dari pemerintah - Masyarakat mendapat pembiayaan yang fleksibel untuk tanah dan perumahannya - Keamanan dalam penguasaan lahan adalah salah satu aspek penting dalam keberhasilan program ini - Program ini dilaksanakan oleh masyarakat bekerjasama dengan mitra/partner perkotaan
11.	Marie Huchermeyer, 2008	<i>Slum upgrading in Nairobi within the housing and basic services market: a housing rights concern</i>	Metode kualitatif	<p>Terjadi komersialisasi hunian dan layanan dasar yang sangat tinggi di Nairobi. Manfaat peningkatan permukiman kumuh sangat terdistorsi pasar yang meningkatkan kekhawatiran akan pemindahan diantara penduduk di daerah kumuh. Kunci penting untuk mewujudkan hak perumahan melalui peningkatan permukiman kumuh yang terdistorsi pasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi standar minimum perumahan - Adanya peran dari aktor sosial (seseorang yang berpengaruh, misal : tokoh agama) - Mengurangi komersialisasi

Sumber : Hasil Analisis, 2019